



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNAWAN WIDAGDO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 435752

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 9.195.000.000

1. Tanah Seluas 2.636 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 5.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.692 m2/170 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.532 m2/170 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.400.000.000
5. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 370.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 26.971.758

F. HARTA LAINNYA

Rp. 600.000.000

Sub Total

Rp. 10.191.971.758

III. HUTANG

Rp. 168.855.065

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.023.116.693



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.